

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
DI DESA TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU
KABUPATEN GORONTALO**

OLEH

**ISKANDAR BILONDATU
NIM: S2117006**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2021**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA TULADENGGI
KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO**

Oleh:

ISKANDAR BILONDATU

S2117006

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Telah disetujui dan diseminarkan,
Gorontalo, Desember 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
NIDN: 0913027101

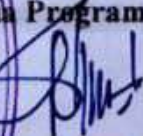
Pembimbing II



Purwanto, S.IP., M.Si
NIDN: 0926096601



**Mengetahui
Ketua Program Studi,**



Darmawaty Abd. Razak., S.IP., M.AP
NIDN: 0924076701

LEMBAR PENGESAHAN

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO

Oleh :

ISKANDAR BILONDATU

S2117006

SKRIPSI

Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Tim Pembimbing dan Penguji :

1. Dr. Fatma M. Ngabito, S.IP., M.Si
2. Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
3. Sandi Prahara, ST., M.Si
4. Dr. Moch. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si
5. Purwanto, S.IP., M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik



Dr. Arman S.Sos., M.Si
NIDN : 091308602

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyetakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi tidak terdapat karya yang telah publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 11 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



ISKANDAR BILONDATU

S.21.17.006

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11)

“Ketika kamu sedang berjuang, yang kamu harus tahu bahwa perjuanganmu saat ini akan terbayar suatu saat nanti” – Iskandar Bilondatu –

“Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat” (Riwayat Abu Huraira Radhiallahu Anhu)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT, karena kepadanya lah kami menyembah dan kepadanya lah kami memohon pertolongan

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada :

Orang tua ku yang tercinta Bapak Almarhum Ali Bilondatu dan Ibu Neni Yunus

Koli yang selalu memberikan motivasi dalam hidupku

Kakak, Adik dan Kekasih yang selalu memberikan inspirasi dalam hidupku

Teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ABSTRAK

ISKANDAR BILONDATU. S2117006. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pembangunan partisipatif dan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive, dan dipilih sebagai informan adalah Kepala Desa Tuladenggi, Ketua LPMD Desa Tuladenggi, Tokoh masyarakat Desa Tuladenggi, dan masyarakat Desa Tuladenggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi sudah melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kegiatan pembangunan desa. Pelibatan masyarakat tersebut dimulai pada saat pelaksanaan musyawarah dusun (musdus) yang dihadiri perwakilan warga masyarakat dari rukun tetangga dan rukun warga. Hasil dari musyawarah di setiap dusun tersebut, dibuatkan laporan hasil musdus dalam bentuk draf awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Tuladenggi, yang selanjutnya akan dibawa sebagai bahan ke musyawarah desa. Adapun, bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi, dari aspek partisipasi buah pikiran, sudah dilakukan oleh masyarakat, dimana ada yang menyampaikan secara langsung, dan ada juga melalui perwakilan tokoh masyarakat dusun setempat, namun jumlah warga yang menyampaikan masukan, masih kurang maksimal. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterampilan, masih kurang maksimal. Adapun partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, juga telah dilakukan masyarakat, yakni dalam menyiapkan tempat penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tuladenggi dan menyiapkan makanan dan minuman ringan untuk warga dan juga pada saat pelaksanaan musrenbang. Sedangkan, partisipasi masyarakat dalam bentuk harta benda/uang/modal, juga masih kurang dalam bentuk swadaya gotong royong (pengumpulan dana), karena terkait juga dengan kondisi perekonomian warga masyarakat Desa Tuladenggi.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan partisipatif, lembaga pemberdayaan masyarakat desa

ABSTRACT

ISKANDAR BILONDATU. S2117006. THE COMMUNITY PARTICIPATION IN PARTICIPATORY DEVELOPMENT PLANNING AT TULADENGGI VILLAGE, TELAGA BIRU SUBDISTRICT, GORONTALO DISTRICT

This study aims to find participatory development planning and forms of community participation in participatory development planning at Tuladenggi Village, Telaga Biru Subdistrict. This research uses a qualitative approach with a case study method. The determination of informants is carried out using a purposive technique covering the Tuladenggi Village Head, Chief of Tuladenggi Village Community Empowerment Board, Tuladenggi Village Community Leaders, and Tuladenggi Village Community. The results of the study indicate that participatory development planning at Tuladenggi Village has involved the community as the target group of village development activities. Community involvement begins with the hamlet meeting attended by representatives of community members from the neighborhood and community units. The deliberation in each hamlet covers the hamlet meeting report made as an initial draft of the Tuladenggi Village Government Work Plan to function as material to the village meeting. Meanwhile, the form of community participation in participatory development planning in Tuladenggi Village, from the aspect of participation ideas, has been carried out by the community where some convey directly, and some are also through representatives of local hamlet community leaders. However, the number of residents who submit inputs is still lacking. Community participation in the form of skills is still not optimal. Community participation in the form of energy has also been carried out by the community, namely in preparing the venue for the Tuladenggi Village development planning deliberation and preparing food and soft drinks for residents as well as during the implementation of the Development Planning Conference. Meanwhile, community participation in the form of property/money/capital is still lacking in the case of self-help mutual assistance (fundraising) because it is also related to the economic condition of the people of Tuladenggi Village.

Keywords: community participation, participatory development planning, village community empowerment institutions

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga calon peneliti masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga calon peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan judul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU**

Calon peneliti juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu calon peneliti dalam menyelesaikan usulan penelitian ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga calon peneliti dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
- 6) Bapak Dr. Kindom Makalawuzar,S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo

- 7) Bapak Dr. Arman,S.IP.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Sosiologi dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Bapak Marten Nusi,S.Ip.,M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Sosiologi dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Ibu Dwi Ratnasari,S.Sos.,M.Si Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Sosiologi dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
- 10) Bapak Rahmansyah,S.IP.,M.Si Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Sosiologi dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
- 11) IbuDarmawaty Abdul Razak,S.IP.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosiologi dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
- 12) Ibu Sandy Prahara,S.IP.,M.Si Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosiologi dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
- 13) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing calon peneliti sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 14) Seluruh Staf Fakultas Sospol Unisan Gorontalo yang banyak memabtu dalam hal pengurusan adminstrasi dan persyaratan sehingga calon peneliti dapat sampai ketahap ini.
- 15) Teman-teman seangkatan Fakultas Sospol yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Calon Peneliti sehingga usulan ini dapat diselesaikan.
- 16) Semua Pihak yang tidak sempat calon peneliti sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian usulan penelitian ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan Usulan penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri calon peneliti.

Gorontalo, Agustus 2021

Iskandar Bilondatu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lembaga pemberdayaan masyarakat desa	7
2.2 Konsep partisipasi	10
2.3 Bentuk partisipasi	17
2.4 Konsep perencanaan pembangunan partisipatif	20
2.5 Proses perencanaan pembangunan daerah	21
2.6 Musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).....	23
2.7 Kerangka pemikiran.....	29

BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek penelitian.....	31
3.2 Desain penelitian.....	31

3.3	Fokus penelitian	32
3.4	Informan	32
3.5	Jenis data	33
3.6	Teknik pengumpulan data.....	33
3.7	Teknik analisis data	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.2	Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ...	38
4.3	Hasil Penelitian.....	43
4.3.1	Perencanaan pembangunan partisipatif Desa Tuladenggi	44
4.3.2	Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif Desa Tuladenggi	49
4.4	Pembahasan	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan.....	63
5.2.	Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perkembangan perencanaan partisipatif berawal dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen semua anggota pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan. Dalam system perencanaan pembangunan nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan (eksekutif, legislative, yudikatif, masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non pemerintah, dan lain-lain). (Penjelasan PP 40 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional).

Musrenbang merupakan musyawarah pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat. Di desa/kelurahan dan kecamatan dikenal dengan sebutan musrenbang desa/kelurahan dan musrenbang kecamatan. Pada tingkat kota/kabupaten dan provinsi, serta pusat dikenal dengan sebutan musrenbang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)/nasional.

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses di mana usaha-usaha masyarakat desa, terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua pemangku kepentingan yang berperan utama dan sejajar, yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini membuat perencanaan untuk pembangunan desa yang dipimpinnya, sedangkan masyarakat diharapkan partisipasinya dalam keseluruhan proses pembangunan, mulai dari perencanaan sampai merasakan hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan yang partisipatif haruslah dimulai dari masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya. Masyarakat merupakan pelaku utama pembangunan, dan olehnya itu pemerintah desa harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan desa. Keberadaan masyarakat desa tidak selalu otomatis akan dapat memberikan efek positif dalam proses pembangunan desa. Efek positif dari masyarakat desa dapat terwujud bilamana masyarakat desa telah memahami setidaknya peran mereka dalam konsep pembangunan desa, sehingga diperlukan informasi dan komunikasi dua arah sebagai media sosialisasi dalam pembangunan desa.

Untuk mempercepat pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat desa, maka dibentuk lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) yang fokus terhadap upaya meningkatkan keterampilan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam

pembangunan desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD) sebagai lembaga kemasyarakatan desa, dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 94 ayat 3, disebutkan bahwa lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Pembentukan lembaga seperti LPMD menunjukkan bahwa masyarakat desa dipandang perlu untuk diberdayakan dalam kerangka partisipasi perencanaan dan pembangunan desa, mengingat masih minimnya sumber daya manusia di desa yang dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pembangunan desa.

Dalam era pembangunan desa yang semakin maju, peran serta masyarakat diharapkan dapat terwujud bukan hanya dalam format kerja bakti dan donasi, tetapi masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk terlibat lebih banyak dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan, sehingga program yang disusun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik. Peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan ini adalah bentuk peran serta yang harus dilembagakan dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan merupakan bentuk peran serta yang harus dilembagakan dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat. Oleh karena itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) perlu untuk menggali potensi peran serta masyarakat dalam pembangunan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

LPMD di Desa Tuladenggi juga berupaya melakukan pemberdayaan masyarakat desa untuk ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya, banyak ditemukan permasalahan, diantaranya adalah sebagian masyarakat umumnya belum mengetahui dan mengerti atas haknya di dalam menyalurkan aspirasi/tuntutan, peran lembaga RT/RW di lingkungan masyarakat belum berfungsi dan berperan di dalam mensosialisasikan hak-hak rakyat dan partisipasinya di dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Desa Tuladenggi, serta masyarakat cenderung pasif terhadap pertemuan-pertemuan atau agenda yang diselenggarakan desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang meminta masukan tentang apa yang harus dibangun di desa ini dan akan direncanakan dalam kegiatan perencanaan (wawancara dengan kepala desa, Johan Panigoro, 7 Desember 2021).

Permasalahan tersebut banyak memberikan dampak pada tingkat partisipasi masyarakat Desa Tuladenggi, baik dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa di musrenbang maupun dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Hal ini tentunya kurang mendukung pelaksanaan perencanaan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama karena mereka yang membutuhkan pembangunan dan akan menikmati hasil pembangunan di Desa Tuladenggi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang merata, khususnya di tingkat desa diperlukan peningkatan prakarsa dan peran masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan. Pembangunan tidak semata-mata menjadi tugas pemerintah saja, melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat bahkan

keberhasilan pembangunan tergantung dari peran masyarakat, baik secara fisik maupun moril. Pentingnya pembangunan pada tingkat desa karena merupakan jenjang yang sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan yang telah direncanakan dalam suatu program tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi apalagi pusat. Disamping itu juga, desa merupakan suatu sistem yang langsung berhubungan dengan rukun tetangga dan rukun warga yang mana di rukun tetangga dan rukun warga itulah objek dari pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan uraian permasalahan, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru.

1.2 . Rumusan masalah

dalam penelitian ini dapat dibuat rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana perencanaan pembangunan partisipatif Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru?
2. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru?

2.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui perencanaan pembangunan partisipatif Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru.

2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru.

2.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan berupa pengembangan konsep dan teori mengenai partisipasi masyarakat dan perencanaan pembangunan partisipatif.

b) Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan informasi kepada kepala Desa Tuladenggi dan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Tuladenggi mengenai permasalahan partisipasi masyarakat dan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

c) Manfaat untuk peneliti

Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan konsep dan teori partisipasi dan perencanaan pembangunan partisipatif di tengah masyarakat.

.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa

Lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa. Menurut Robins dan Judge (2008) yang dikutip oleh Minarni (2014;376) organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar terdiri atas dua orang atau lebih dan yang relative terus menerus untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Kemudian pendapat lain yang dikatakan Wibowo (2007) yang dikutip oleh Minarni (2014; halaman 376) organisasi adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.

Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), memiliki peranan untuk menampung aspirasi tentang rancangan pembangunan di desa maupun kelurahan, serta ikut memberdayakan masyarakat melalui program pembangunan yang ada di tingkat desa maupun tingkat kelurahan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) desa adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tugas lembaga pemberdayaan masyarakat adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan,

memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat, serta menumbuhkan kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Landasan hukum dari peran LPM dalam pembangunan desa yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu pada pasal 94, yang menyebutkan:

- 1) Desa memberdayakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada (rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat) dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa;
- 3) Lembaga kemasyarakatan desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa;
- 4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah, daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa.

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ke arah pembangunan dapat dilihat dalam perencanaan dan pelaksanaan tugasnya yaitu:

- a. Merencanakan pembangunan yang partisipatif, yaitu melibatkan komponen masyarakat yang ada di dalam kesatuan wilayah kelurahan/desa dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan.
- b. Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan, yaitu menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan secara terpadu, baik berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, yaitu melaksanakan pembangunan sesuai dengan memanfaatkan alokasi dana yang tersedia baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat dan mengendalikan jalannya pembangunan agar hasil yang didapat sesuai dengan fungsinya. Mengendalikan pembangunan dapat juga berupa pemeliharaan hasil-hasil pembangunan agar fungsinya dapat tetap berjalan untuk jangka waktu yang cukup lama.

Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan kelurahan atau desa, perlu diketahui perkembangan pembangunan di daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, karena walau bagaimanapun peran pemerintah sangat penting bagi kemajuan suatu desa.

2.2. Konsep partisipasi

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap proses pembangunan di desa, karena dalam kegiatan pembangunan, kebutuhan masyarakatlah yang dijadikan prioritas utama pembangunan. Menurut Tjokrowinoto (2017:86), bahwa partisipasi masyarakat merupakan cara yang efektif dalam membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah. Selanjutnya partisipasi masyarakat juga dianggap dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan sampai pada tingkat paling bawah.

Pendapat sumarto yang dikutip dalam jurnal oleh Fathurrahman Fadil (2013:254) mengatakan bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholdes sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberative, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi. Partisipasi dalam konteks pembangunan menurut Adisasmita (2006) dikutip dalam jurnal oleh Fathurrahman Fadil (2013:255) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan warga masyarakat dalam kegiatan pembangunan meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implemenatsi), program pembangunan yang diukerjakan di masyarakat lokal. Adisasmita juga mengatakan bahwa partiispasi masyarakat adalah pemberdayaan dan peran sertanya dalam kegiatan penyusuna perencanaan dan implemnetasi program pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan kemauan masyarakat untuk

berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan merupakan aktualisasi dan ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program.

Kemudian Hoofsteede yang dikutip Khairuddin (2017:124) mengatakan bahwa partisipasi berarti ambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari suatu proses. Proses yang dimaksud dalam tulisan ini tentu saja proses pembangunan. Sedangkan menurut Khairuddin (2002:124), dalam pengertian ini paling tidak, dapat dijumpai adanya tiga hal pokok, yaitu partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi; partisipasi menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok; partisipasi merupakan tanggungjawab terhadap kelompok.

Davis mengemukakan definisi partisipasi dalam jurnal yang dikutip Herman (2019; halaman 78) bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan, serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Valderama (1999) dalam jurnal yang dikutip Herman (2019;80) mengatakan ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama jika dikaitkan dengan penggunaan masyarakat yang demokratis, yakni, a) partisipasi politik. Partisipasi ini lebih berorientasi pada mempengaruhi dan mendudukan wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan ketimbang aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri, b) partisipasi sosial. Partisipasi

ditempatkan sebagai keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau pihak luar diproses dalam pembangunan, konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan dan evaluasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat prose pembelajaran dan mobilisasi sosial, 3) partisipasi warga. Partisipasi ini menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan.

Kemudian Bhattacharyya yang dikutip Taliziduhu Ndraha (2017:102) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Kasim Usman (2019:46) menjelaskan bahwa pada hakekatnya partisipasi sama artinya dengan gotong-royong. Gotong-royong terdiri dari dua kata, yaitu gotong berarti semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari semua karya secara bersama-sama, sedangkan royong berarti membagi hasil karya masing-masing dan menerima bagian-bagiannya sendiri sesuai dengan sumbangan karyanya. Sedangkan Mubyarto (2018:35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu barhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling penting tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Maka di

dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibagi dalam empat tahapan, Kaho (2018:127-124), yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan dalam proses rencana pembangunan. Dalam tahap ini partisipasi masyarakat sangat mendasar sekali, terutama karena putusan politik yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya, apabila mereka merasa ikut andil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk menentukan arah dan strategi pembangunan disesuaikan dengan sikap dan budaya masyarakat setempat. Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan suatu proses dalam memilih alternatif yang diberikan oleh semua unsure masyarakat, lembaga-lembaga sosial dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam proses rencana pembangunan, biasanya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bertujuan untuk memilih alternatif perencanaan dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan, Partisipasi ini merupakan tindakan selanjutnya dari tahap pertama, partisipasi dalam pembangunan akan terlihat ketika masyarakat ikutserta dalam memberi kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi

yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Berhasilnya suatu pembangunan tergantung dari keikutsertaan dalam berpartisipasi seluruh.

Partisipasi rakyat, terutama rakyat perdesaan dalam pembangunan sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda yaitu:

- a. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek pembangunan yang khusus, dalam tipe ini rakyat perdesaan diajak, diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fisik. Kalau rakyat ikut serta berdasarkan atas keyakinan bahwa proyek itu bermanfaat baginya, maka mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas, tanpa mengharapkan upah yang tinggi. Sebaliknya, kalau mereka hanya diperintah dan dipaksa oleh atasan untuk menyumbangkan tenaga atau harta bendanya kepada proyek tadi, maka mereka tidak akan turut berpartisipasi dengan semangat tadi.
 - b. Partisipasi sebagai individu di luar aktifitas-aktifitas bersama dalam pembangunan. Dalam tipe partisipasi ini tidak ada proyek aktifitas bersama yang khusus, tapi masih termasuk proyek pembangunan, tidak bersifat fisik dan tidak memerlukan perintah atau paksaan dari atasannya.
3. Partisipasi dalam Memamfaatkan Hasil Pembangunan, Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka dalam tahap ini masyarakat secara bersama akan menikmati hasil pembangunan dengan adil tanpa ada pengecualian. Setiap masyarakat akan mendapatkan bagian sebesar kontribusi atau pengorbanan yang diberikan. Manfaat yang dapat diterima dalam

pembangunan ini yaitu mamfaat materialnya, mamfaat sosialnya, dan mamfaat pribadi.

Banyak cara untuk mengklarifikasikan dan menganalisis dari hasil-hasil pembangunan. Dari segi distribusi dapat dilihat pada jumlah maupun kualitas mamfaat. Dari segi lain dapat dibedakan antara *material benefit* dan *sosial benefits*. *Material benefits* dalam menganalisa akan berhubungan dengan konsumsi atau pendapatan, kekayaan, sedangkan sosial benefits seperti, pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih, jalan, fasilitas transportasi.

Partisipasi dalam Evaluasi, suatu kegiatan dapat dinilai apabila memberi mamfaat yang sepantasnya bagi masyarakat. Maka dalam tahap ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai sendiri hasil yang sudah didapat dalam pembangunan, dan masyarakat menjadi hakim yang adil dan jujur dalam menilai hasil yang ada.

Menurut Alfriti (2018:233) ada tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam suatu program. (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya pembangunan serta proyek akan gagal, (2) yaitu masyarakat dapat mempercayai proyek atau pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, (3) yang mendorong adanya partisipasi umum di

banyak Negara, karena timbul anggapan merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Kemudian Alfitri (2018:36), mengatakan bahwa dalam pengembangan masyarakat, partisipasi menjadi salah satu bagian penting dalam pencapaian tujuan pengembangan masyarakat, karena perlu dilibatkan dalam tiap proses pembangunan, yaitu:

1. Identifikasi masalah, yang masyarakat bersama dengan para perencana ataupun pemegang otoritas kebijakan tersebut identifikasi persoalan dalam diskusi kelompok, *brainstorming*, identifikasi peluang, potensi dan hambatan
2. Proses perencanaan, yang masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana dan strategi dengan berdasar pada hasil identifikasi
3. Pelaksanaan proyek pembangunan
4. Evaluasi, masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang dilakukan, apakah pembangunan memberikan hasil guna (manfaat bagi masyarakat) ataukah justru masyarakat dirugikan dengan proses yang telah dilakukan, merupakan inti dari poses evaluasi. Menurut Suharto (2016:119) evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program.
5. Mitigasi, yakni kelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negatif pembangunan, dan
6. Monitoring tahap yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan. Dalam tahap ini, juga dimungkinkan adanya penyesuaian

berkaitan dengan situasi dan informasi terakhir dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.

2.3. Bentuk partisipasi

Menurut Ndraha (2017:45) partisipasi masyarakat didorong melalui, yakni: (1) proyek pembangunan bagi masyarakat desa/kelurahan yang dirancang sederhana dan muda dikelola oleh masyarakat; (2) organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; (3) peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian masih dibutuhkan wadah untuk berprestasi di tingkat kelompok. Melalui wadah partisipasi ditingkat kelompok, anggota kelompok akan saling belajar melalui pendekatan “learning by doing” menuju pada tujuan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, sehingga hal ini menjadi adanya perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang merupakan potensi untuk pembangunan.

Pendekatan pembangunan yang menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai faktor utama merupakan konsep pembangunan partisipatif. Dalam pendekatan ini, masyarakat menjadi subyek utama dalam keseluruhan proses kegiatan pembangunan, mulai dari tahap pertencanaan sampai pada tahap pengendalian pembangunan. Asumsi yang menjadi dasar gagasan ini adalah bahwa masyarakat merupakan pihak yang diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan mereka sendiri. Banyak bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat dalam kegiatan

perencanaan pembangunan. Hamidjojo dalam jurnal Tesyalom Sembel, dkk (2019) mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat, yakni:

a) Partisipasi buah pikiran

Partisipasi buah pikiran dapat dilakukan dengan cara memberikan saran, gagasan, pendapat, baik secara lisan ataupun tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang agar pembangunan desa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat setempat, baik dalam tahapan pra rencana, maupun dalam penyusunan rencana serta implementasinya, seperti ikut dalam pertemuan dan rapat ataupun melakukan kritik dan saran atas apa yang sedang akan dilaksanakan.

b) Partisipasi keterampilan

Partisipasi keterampilan dapat dilakukan dengan menyumbangkan keterampilan/keahlian yang dimilikinya kepada pemerintah desa demi kelancaran pembangunannya desa, seperti keahlian dalam bidang perencanaan, menggambar (arsitek), keahlian bidang pertukangan (tukang batu, tukang kayu) dan lain-lain sebagainya.

c) Partisipasi tenaga

Partisipasi tenaga dapat dilakukan dengan cara menyumbang tenaganya, misalnya aktif dalam kegiatan royong untuk memperlancar kegiatan perencanaan dan pembangunan desa, yang umumnya dalam bentuk gotong royong, seperti aktif dalam

perbaikan-perbaikan saluran-saluran air (drainase), pos kamling, sarana ibadah dan lain-lain sebagainya.

d) Partisipasi harta benda/uang/modal

Partisipasi harta benda dan uang dapat dilakukan dengan cara memberikan sumbangan harta benda/uang kepada pemerintah atau badan/lembaga tertentu, atau menabung uang di bank-bank pemerintah, untuk menunjang dan mendorong agar perencanaan dan pembangunan desa berjalan lancar sesuai program pemerintah desa, baik sukarela maupun sedikit mobilisasi.

Chapin dan Stepanek dalam Jusman Iskandar (2016:79) mencatat ada lima aspek yang terkait dengan tipe-tipe partisipasi masyarakat, yaitu dari penilaian masyarakat tentangan yang rendah hingga ke penilaian masyarakat tentangan yang tertinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. Keanggotaan seseorang dalam organisasi atau kelompok kegiatan masyarakat.
- b. Intensitas kehadiran seseorang dalam berbagai pertemuan masyarakat.
- c. Intensitas seseorang dalam memberikan sumbangan dana atau keuangan bagi kepentingan bersama.
- d. Keanggotaan seseorang dalam berbagai kepanitiaan yang dibentuk dalam masyarakat.
- e. Posisi kepemimpinan seseorang dalam berbagai organisasi/ kelompok kegiatan.

2.4. Konsep perencanaan pembangunan partisipatif

Kegiatan perencanaan yang dilakukan pemerintah saat ini, melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kerja tahun anggaran berikutnya. Musrenbang ini dirancang sebagai kegiatan perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, sehingga sangat dibutuhkan sekali partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah masing-masing, baik pada tingkat kota/kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Menurut Suratman (2008) yang dikutip oleh Aryati Puspasari Abady (2013:27) mengatakan bahwa perencanaan partisipatif merupakan salah satu proses pembelajaran yang penting untuk masyarakat. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, perencanaan partisipatif artinya menekankan partisipasi luas dari semua stakeholders dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan.

Menurut Abe (2008) yang dikutip oleh Aryati Puspasari Abady (2013:27) perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuan dan prosesnya melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Abe juga menawarkan dua bentuk perencanaan partisipatif, yaitu pertama perencanaan yang langsung disusun bersama rakyat, berupaka perencanaan lokasi setempat

(menyangkut daerah dimana masyarakat berada) dan berupa perencanaan wilayah yang disusun dengan melibatkan masyarakat secara perwakilan sesuai institusi yang sah (seperti parlemen).

Institusi pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, pembangunan yang mengaktualkan perilaku kepublikan (transparansi, konsistensi, akuntabilitas dan kepastian hukum), pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kemandirian, kredibilitas, kemitraan dan keunggulan (K4).

2.5. Proses perencanaan pembangunan daerah

Proses penyusunan rencana pembangunan yang bersifat bottom up (perencanaan dari bawah), yakni:

a) MUSBANGDES (Musyawarah Pembangunan Desa)

Musbangdes atau istilah lainnya musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa). Kegiatan perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat desa, yang biasanya dihadiri oleh mereka yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan, ataupun sesuai dengan kebijakan dari kabupaten. Namun, seringkali dalam prakteknya hanya menjadi semacam formalitas belaka, karena kegunaan dari musbangdes ini masih perlu dipertanyakan. Mestinya sebelum dilakukan musyawarah di tingkat desa, ketua-ketua RT dan RW mengajak berembuk dengan warga mengenai kebutuhan apa saja yang harus diajukan

sebagai usulan kepada pemerintah desa, lalu dilakukanlah musyawarah pembangunan di tingkat desa yang bersangkutan.

b) MUSBANGCAM (Musyawarah Pembangunan Kecamatan)

Musbangcam (musyawarah pembangunan kecamatan) atau istilah lainnya musrenbangcam (musyawarah rencana pembangunan kecamatan). Merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan musyawarah pembangunan di tingkat desa. Kegiatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai masukan dari seluruh kawasan desa dalam satu kecamatan, kemudian yang menghadiri biasanya adalah mereka perwakilan dari desa. Karena sudah banyak masukan dari seluruh desa, maka mestinya pada tingkatan ini sudah harus dipikirkan mengenai pembuatan skala prioritas pembangunan yang akan diajukan.

c) MUSBANGKAB (Musyawarah Pembangunan Kabupaten)

Musbangkab (musyawarah pembangunan kabupaten) atau istilah lainnya musrenbangkab (Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten). Musyawarah ini dilakukan di tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh para perwakilan dari kecamatan-kecamatan untuk kemudian melakukan sinkronisasi rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dengan rencana-rencana yang telah dibikin oleh dinas-dinas. pada level ini biasanya akan terjadi tarik ulur kepentingan antara masukan aspirasi dari masyarakat dan dinas-dinas. Olehnya itu, harus dicari format skala prioritas pembangunan masyarakat

melalui pola perengkingan, sehingga dapat dicapai kesepakatan bersama, dan tidak hanya pada coret-mencoret yang dilakukan oleh para kepala dinas semata. Penentuan skala prioritas ini tidak boleh dilakukan secara sepihak karena hasil dari pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD). Draft APBD ini kemudian diajukan oleh pemerintah kabupaten untuk dimusyawarahkan dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

2.6. Musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes)

Dalam kegiatan pembangun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai fungsi yang sangat vital, terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat dalam bentuk partisipasi, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa (RKP desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 6 tahunan, yaitu RPJM desa dan dokumen rencana tahunan, yaitu RKP Desa.

Peserta Musrenbang Desa:

Peserta musrenbang desa idealnya diikuti oleh berbagai komponen masyarakat, baik individu maupun kelompok yang terdiri dari:

- a) Keterwakilan wilayah (dusun/kampong/RW/RT)
- b) Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi, pertanian, kesehatan, pendidikan, lingkungan)
- c) Keterwakilan kelompok usia (generasi muda, generasi tua)
- d) Keterwakilan kelompok sosial dan jenis kelamin (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kelompok marjinal)
- e) Keterwakilan 3 unsur tata pemerintahan (pemerintah desa/kelurahan, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum), serta
- f) Keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa/urusan desa/kelurahan.

Dalam musrenbang, semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi peserta musrenbang. Namun ada beberapa kriteria persyaratan yang sebaiknya diketahui warga masyarakat yang berminat menjadi peserta, yakni:

- a) Dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitu kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, anti dominasi, anti diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum (desa), dan keberpihakan terhadap kalangan marjinal.

- b) Bersedia mempersiapkan diri dengan cara ikut serta mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi, dokumen, dan materi yang relevan untuk pelaksanaan musrenbangdes. Untuk memperoleh informasi, peserta dapat menghubungi sumber informasi, yaitu tim pemandu maupun tim penyelenggara musrenbangdes.
- c) Memiliki minat untuk membangun kapasitasnya kebijakan, aturan, arah program pemerintah, berbagai isu pembangunan, dan sebagainya, sehingga bisa berperan serta sebagai peserta musrenbang yang aktif. Untuk penguatan kapasitas, tim pemandu maupun tim penyelenggara musrenbangdes dapat menyelenggarakan simulasi musrenbangdes terlebih dahulu.

Menurut Saeful Muluk (2019:30) penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan desa meliputi:

Proses Umum Tahapan Musrenbang Desa

Sesuai dengan tata waktu dan mekanisme proses, musrenbangdes dibagi menjadi:

1) tahap pra-musrenbang desa

- a. Pengorganisasian Musrenbang, terdiri atas kegiatan-kegiatan dimana kepala desa menunjuk ketua LKM/LPM untuk menjadi ketua tim penyelenggara musrenbang desa. Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut:

- Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM);
- Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 orang);
- Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa, berupa:
 - Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang desa;
 - Pengumuman kegiatan Musrenbang desa dan penyebaran undangan kepada peserta dan narasumber (minimal 7 hari sebelum Hari-H);
 - Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat, dan bahan)

b. Pengkajian desa secara partisipatif, terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- Kajian kondisi, permasalahan, dan potensi desa (per dusun/RW dan/atau per sektor/isu pembangunan) bersama warga masyarakat;
- Penyusunan data/informasi desa dari hasil kajian oleh tim pemandu.
- Penyusunan draf Rancangan Awal RKP Desa, terdiri atas kegiatan-kegiatan, berupa:
 - Kaji ulang dokumen RPJM Desa dan hasil-hasil kajian desa oleh TPM dan Tim Pemandu;
 - Kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran daerah oleh TPM dan Tim Pemandu;

- Penyusunan draf Rancangan Awal RKP Desa dengan mengacu pada kajian tadi oleh TPM dan Tim Pemandu.

2) tahap pelaksanaan musrenbang desa

Dalam pelaksanaannya Kepala Desa menunjuk ketua LKM/LPM untuk menjadi ketua tim penyelenggara musrenbang desa. Dengan rician acara sebagai berikut:

- a) Pembukaan acara dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang desa;
- Laporan dari ketua panitia Musrenbang (Ketua TPM);
- Sambutan dari kepala desa sekaligus pembukaan secara resmi;
- Doa bersama

- b) Pemaparan dan diskusi dengan narasumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah:

- Pemaparan oleh wakil masyarakat mengenai gambaran persoalan desa menurut hasil kajian, yang dibagi sesuai dengan urusan/bidang pembangunan desa;
- Pemaparan kepala desa mengenai: (1) hasil evaluasi RKP Desa yang sudah berjalan; (2) kerangka prioritas program menurut RPJM Desa; (3)

Informasi perkiraan ADD dan sumber anggaran lain untuk tahun yang sedang direncanakan;

- Pemaparan pihak kecamatan, UPTD/SKPD kecamatan mengenai kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan;
 - Tanggapan/diskusi bersama warga masyarakat.
- c) Pemaparan draf Rancangan Awal RKP Desa oleh TPM (biasanya Sekdes) dan tanggapan atau pengecekan (verifikasi) oleh peserta.
- d) Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggarannya per bidang/isu.
- e) Musyawarah penentuan Tim Delegasi Desa.
- f) Penutupan yaitu penandatanganan berita acara Musrenbang dan penyampaian kata penutup oleh Ketua TPM/pemandu.

3) tahap pasca-musrenbang desa

- a) Rapat kerja tim perumus hasil Musrenbang desa yang terdiri dari:
- Dua-tiga (2-3) orang dari TPM dan perangkat desa
 - Tiga (3) orang anggota tim delegasi desa.
- b) Rapat kerja finalisasi dokumen:
- RKP-Desa dan penyusunan APB Desa untuk desa

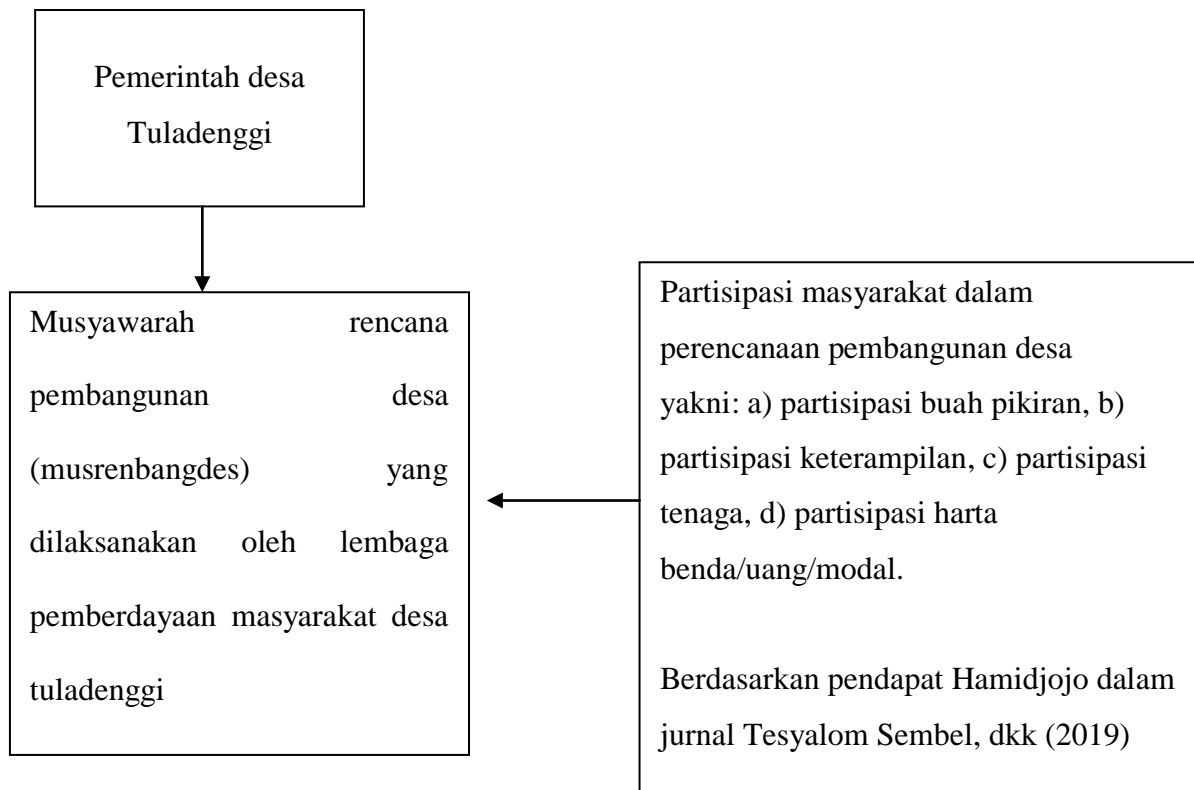
- Renja OPD desa dan penyusunan daftar prioritas kegiatan pembangunan swadaya desa dan daftar prioritas kegiatan permasalahan pembangunan desa.

2.7. Kerangka pemikiran

Penelitian akan mengkaji tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru.

Untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif digunakan pendapat Hamidjojo dalam jurnal Tesyalom Sembel, dkk (2019) mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat, yakni: a) partisipasi buah pikiran, b) partisipasi keterampilan, c) partisipasi tenaga, d) partisipasi harta benda/uang/modal.

Adapun perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru melalui musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes), yang meliputi: a) tahap pra-musrenbang desa, b) tahap pelaksanaan musrenbang desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar.



BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan yakni selama tiga bulan.

3.2 Desain penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Selanjutnya menurut Lexy Moleong (2018:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic (menyeluruh), dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2013: 1). Sedangkan menurut Prastowo (2016) metode

studi kasus adalah metode studi yang eksploratif tentang keseluruhan personalitas dengan subyek penelitian berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.

3.3 Fokus Penelitian

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dikemukakan mengenai fokus penelitian sebagai berikut:

Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru. Menurut Tesyalom Sembel, dkk (2019) partisipasi masyarakat dapat berupa:

- a) partisipasi buah pikiran
- b) partisipasi keterampilan
- c) partisipasi tenaga
- d) partisipasi harta benda/uang/modal

3.4 Informan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informan adalah orang yang memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian (nara sumber). Dengan demikian, informan merupakan narasumber yang memberikan informasi menyangkut permasalahan yang diteliti. Informan yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah:

- a) Kepala Desa Tuladenggi
- b) Ketua LPMD Desa Tuladenggi
- c) Tokoh masyarakat Desa Tuladenggi (1 orang)

- d) Masyarakat Desa Tuladenggi (4 orang)

3.5 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data terdiri dari dua, yakni:

- a. Data primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data yang bersumber atau berasal dari informan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

- b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan, dokumen dokumen, buku teks, yang ada baik pada instansi kantor desa dan LPMD, maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Observasi

Yaitu penulis melakukan kegiatan pengamatan secara langsung pada objek penelitian dengan cara non partisipasi, artinya peneliti tidak ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan desa tuladenggi dan hanya mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b) Wawancara

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang dan masalah penelitian, yakni menyangkut Musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari arsip/dokumen yang ada di tempat penelitian, terkait Musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Dokumentasi dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam buku memahami penelitian kualitatif, Sugiyono (2017:91) mengatakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman dalam buku memahami penelitian kualitatif yang ditulis Sugiyono (2017:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

a. Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami (catatan tentang apa yang dilihat dan didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami). Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

b. Data reduction

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkaikan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

c. Data display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik. Pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut,

maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

d. Conclusion drawing/verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:99) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Tuladenggi merupakan salah desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Desa ini terletak antara:

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Dumati
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tinelo
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ulapato B
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pantungo

Desa ini terdiri atas dusun, yakni Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV. Adapun masing-masing jumlah kepala keluarga dan penduduk adalah:

a) Dusun I

Jumlah kepala keluarga = 229

Jumlah penduduk = 678 jiwa (laki-laki = 318, dan perempuan 360)

b) Dusun II

Jumlah kepala keluarga = 449

Jumlah penduduk = 1.612 jiwa (laki-laki = 770, dan perempuan 842)

c) Dusun III

Jumlah kepala keluarga = 406

Jumlah penduduk = 1.345 jiwa (laki-laki = 659, dan perempuan 686)

d) Dusun IV

Jumlah kepala keluarga = 140

Jumlah penduduk = 434 jiwa (laki-laki = 203, dan perempuan 231)

Dengan demikian, jumlah keseluruhan penduduk Desa Tuladenggi adalah sebesar 4.069 jiwa, dengan perbandingan jumlah laki-laki sebanyak 1.950 jiwa dan perempuan sebanyak 2.119 jiwa.

4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

1) KETUA

- a. Merencanakan dan mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,
- b. Meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- c. Memfasilitasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna;
- d. Menyelenggarakan penerapan standar mutu pengabdian kepada masyarakat dan akreditasi kompetensi sarana dan prasarana LPMD;
- e. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat;
- f. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan pola organisasi dan tata kerja pusat-pusat pengabdian kepada masyarakat;

- h. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan program peningkatan kualitas pembinaan, pengembangan dan jaringan pengabdian kepada masyarakat;
- i. Membuat program pengembangan pengabdian kepada masyarakat penerapan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu untuk menunjang pengembangan konsep pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah, pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan;
- j. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi berkelanjutan prosedur dan standar penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- k. Menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan UKM usaha kecil dan menengah serta pemerintah daerah;

2) SEKRETARIS

- a. Menyelenggarakan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan pendataan;
- b. Menyusun rencana dan laporan dari seluruh seksi;
- c. Melaksanakan tugas-tugas ketua bila berhalangan;
- d. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua.

3) BENDAHARA

- a. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan menerima, menyimpan serta menyerahkan uang / surat berharga dan barang;
- b. Membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan program kerja LPMD;
- c. Menyusun laporan semester (program 6 bulan) dan tahunan keuangan LPMD.

- d. Menyelenggarakan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
- e. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang;
- f. Melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh ketua.

4) SEKSI ORGANISASI DAN KEMITRAAN

- a. Bersama lembaga kemasyarakatan desa lain merencanakan pembangunan di wilayah desa.
- b. Bersama lembaga kemasyarakatan desa lain mengawasi dan mengendalikan pembangunan yang termasuk dalam lingkup tugas yang telah diatur.
- c. Bersama kepala desa memantau dan menangani permasalahan organisasi kemasyarakatan.
- d. Bersama kepala desa melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Bersama kepala desa mengevaluasi pelaksanaan, tugas dan kondisi keuangan pada masa akhir kepengurusan LPM.

5) SEKSI PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

- a. Memupuk dan mengembangkan aspirasi masyarakat terhadap kebudayaan dan kegiatan rakyat yang terdapat di desa;
- b. Membantu meningkatkan kegiatan di bidang pendidikan formal dan nonformal di desa;
- c. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap KPM, terutama dengan memberikan kursus-kursus di desa;

- d. Membantu program wajib belajar dengan memberikan kursus / pelatihan keterampilan;
- e. Mengusahakan agar tidak terdapat anak-anak putus sekolah di tingkat SD dengan jalan memberikan dorongan dan bimbingan terhadap orang tua murid;
- f. Membantu secara aktif pemeliharaan gedung/madrasah dan lain-lain yang ada di desa;
- g. Mengusahakan pembangunan atau menambah gedung sekolah /masyarakat;
- h. Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan terutama bagi para remaja putus sekolah yang ada di desa;
- i. Pemberantasan tiga buta melalui kejar paket A, B dan C.

6) SEKSI PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. Mengarahkan pembangunan yang ada di desa agar memiliki kesesuaian dengan green desain, ramah lingkungan, sehat dan bersih.
- b. Melakukan pengawalan terhadap program pembangunan yang diajukan oleh RT/RW.
- c. Berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa lain yang menyangkut pembangunan di wilayah desa.
- d. Pemutakhiran data dan fakta pembangunan di wilayah desa.

7) SEKSI PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KERAKYATAN

- a. Merencanakan, mendorong gerakan perbaikan / rehabilitasi jalan atau sarana perhubungan di desa;

- b. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka perbaikan prasarana/sarana desa;
- c. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka perbaikan prasarana dan sarana pemasaran;
- d. Melaksanakan dan membangun perbaikan sarana dan prasarana lainnya serta mengadakan pendataan;
- e. Menggalakkan penumbuhan usaha ekonomi dan lumbung sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Melakukan upaya peningkatan produksi peternakan, ternak besar seperti sapi dan lain-lain;
- g. Melaksanakan gerakan penyuluhan untuk kelompok usaha koperasi khususnya KUD di pedesaan;
- h. Menggalakan kesadaran menyimpan hasil panen melalui lumbung desa, baik untuk benih maupun untuk pangan.

8) SEKSI PEMUDA, OLAH RAGA, SENI DAN BUDAYA

- a. Melaksanakan penyuluhan untuk mengurangi arus perpindahan pemuda/generasi muda dari desa ke kota dengan mengusahakan lapangan kerja, seperti usaha bersama di bidang pertanian, usaha bersama di bidang peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat untuk masa depan;
- b. Membantu usaha pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja dengan mengisi waktu luang untuk pengembangan bakat;
- c. Membantu mengembangkan karang taruna;

- d. Menghindarkan pemuda semaksimal mungkin dari minuman keras, narkoba, judi dan lainnya dengan menyalurkan mereka kepada kegiatan positif;
- e. Melibatkan pemuda semaksimal mungkin pada kegiatan pembangunan desa.

4.3 Hasil Penelitian

Perencanaan pembangunan daerah melalui musrenbang di Desa Tuladenggi merupakan sarana untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan dari bawah (dari masyarakat) yang secara mekanisme dan fungsional dengan kegiatan merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu dan menumbuhkan kondisi dinamis antara masyarakat. Berbagai usulan atau masukan yang diformulasikan pada musrenbang, kemudian di bawa ke musrenbang kecamatan untuk dibicarakan bersama oleh para perwakilan dari sejumlah desa.

Perencanaan pembangunan Desa Tuladenggi dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan cara ini pemerintah desa makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Masyarakat Desa Tuladenggi harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana

yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai penyedia dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses musrenbang Desa Tuladenggi.

4.3.1 Perencanaan pembangunan partisipatif Desa Tuladenggi

Membangun kemandirian desa tuladenggi harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik. Untuk melaksanakan pembangunan desa tersebut, maka pemerintah desa dan LPM Desa Tuladenggi, perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik, akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat desa untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, pasal 1 ayat 10, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Untuk itulah, kepala desa Tuladenggi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, harus dapat menampung aspirasi masyarakat Desa Tuladenggi, terkait apa yang mereka butuhkan dalam kegiatan pembangunan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Tuladenggi.

Untuk mengetahui bagaimana proses perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi, peneliti melakukan wawancara dengan kepala Desa Tuladenggi, yang mengatakan bahwa:

“Proses Musrembang adalah agenda desa yang mengumpulkan unsur BPD, unsur masyarakat untuk membahas Rencana program Pembangunan untuk 1 tahun ke depan. Mengenai pelaksanaannya semuanya diserahkan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat desa tuladenggi, termasuk menampung aspirasi masyarakat tentang apa saja yang mereka butuhkan untuk segera dibangun di desa ini” (Johan Panigoro, wawancara tanggal 7 Desember 2021).

Dengan demikian, pembangunan partisipatif merupakan suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan desa. Olehnya itu, lembaga pemberdayaan masyarakat desa tuladenggi sebagai wadah pelaksana perencanaan pembangunan desa dan sebagai wadah partisipasi masyarakat, harus semaksimal mungkin menggerakkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa, termasuk partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Hasil wawancara dengan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tuladenggi tentang proses perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi, mengatakan bahwa:

”Musrenbang dilaksanakan setiap bulan januari. Sebelum pelaksanaan, kami mengadakan sosialisasi di masyarakat di tiap-tiap dusun bahwa akan diadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pembangunan di desa ini, kami mengadakan musyawarah dusun (musdus). Musyawarah yang dilaksanakan ditiap dusun keterwakilan dari beberapa RW untuk menentukan permasalahan prioritas di dusun tersebut berupa draft rancangan awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa yang akan di bawa sebagai bahan ke musyawarah desa. Musyawarah desa adalah musyawarah yang bertujuan memilih mana permasalahan yang paling prioritas sesuai hasil ketika musdus dilaksanakan dan dilanjutkan penetapan Rencana Kegiatan Desa (RPJMD)” (Ramond Karim, S.IP, wawancara tanggal 8 Desember 2021).

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi dimulai dengan melakukan sosialisasi di dusun-dusun, kemudian diadakan musyawarah dusun

(musdus) dengan mengundang perwakilan RW untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat di setiap dusun, dan kemudian hasil musyawarah dusun dibuatkan draf awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Tuladenggi yang akan di bawa sebagai bahan ke musyawarah desa yang akan dilaksanakan setiap bulan januari yang menghasilkan Rencana Kegiatan Desa (RPJMD).

Kepala Desa Tuladenggi mengkoordinasikan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa termasuk pendanaan kegiatan musrenbang, yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat.

Hasil wawancara dengan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tuladenggi tentang sumber dana perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi, mengatakan bahwa:

“Sumber pendanaan perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Tuladenggi berasal dari dana desa, dan bukan berasal dari warga masyarakat. Bantuan masyarakat biasanya berupa penyediaan makanan dan minuman ringan (teh, kopi, dan lain-lain), serta rumah warga yang akan dijadikan tempat pelaksanaan perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa” (Ramond Karim, S.IP, wawancara tanggal 8 Desember 2021).

Musyawarah dusun yang merupakan langkah awal penyerapan aspirasi masyarakat, harus benar-benar dimaksimalkan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Tuladenggi, agar semua kebutuhan pembangunan yang diinginkan

mayoritas masyarakat dapat diusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Baik musyawarah dusun (musdus) maupun musrenbang tidak terlepas dari permasalahan dalam pelaksanaannya. Hasil wawancara dengan kepala Desa Tuladenggi, mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi pada saat mengundang masyarakat, kebiasaan masyarakat cenderung pasif terhadap pertemuan-pertemuan atau agenda yang diselenggarakan desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk meminta masukan tentang apa yang harus dibangun di desa ini dan akan direncanakan dalam kegiatan perencanaan di Desa Tuladenggi” (Johan Panigoro, wawancara tanggal 7 Desember 2021).

Kemudia hasil wawancara dengan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tuladenggi, mengatakan bahwa:

“Pada saat Musdus (musyawarah Dusun) semua aspirasi ditampung, ketika pada saat pelaksanaan musrenbang ada sebagian masyarakat yang ngotot ingin aspirasinya dimasukkan ke dalam rencana pembangunan, tapi tidak disampaikan pada saat musyawarah dusun” (Ramond Karim, S.IP, wawancara tanggal 8 Desember 2021).

Dengan demikian, musyawarah perencanaan pembangunan desa tuladenggi yang diadakan untuk menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak, dan penyepakatan perubahan RKP Desa. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan atau terjadinya perubahan mendasar di desa.

4.2.2 Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif Desa Tuladenggi

Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat diperlukan dalam menentukan kebijakan dan keputusan yang harus diambil ke depan, terutama dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Desa Tuladenggi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan sangat besar kontribusi untuk keberlanjutan pembangunan desa karena dengan partisipasi masyarakat akan dapat diketahui program pembangunan apa yang harus direncanakan ke depan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembangunan desa. Keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan semestinya. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan. Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat tersebut. Peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sekarang ini, bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari kegiatan perencanaan.

Merencanakan suatu program pembangunan desa bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Program pembangunan desa yang baik harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang menjadi sasaran dari program tersebut, semakin beragam dan

kompleks kebutuhan dan permasalahan dari masyarakat selaku kelompok sasaran, akan semakin rumit penyusunan perencanaan suatu program pembanguana desa. Masyarakat tentunya memiliki karakteristik tertentu. Masyarakat memiliki kebutuhan dan minat yang beragam, kemampuan mereka dalam menganalisis situasi yang dihadapi juga beragam, kemampuan mereka dalam mengambil keputusan juga tidak sama antar kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya. Ini yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu berbeda-beda. Demikian juga dengan partisipasi masyarakat di Desa Tuladenggi dalam kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif.

a) Partisipasi buah pikiran

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa tuladenggi dapat dilakukan dengan memberikan masukan tentang kebutuhan pembangunan mereka di dusun masing-masing, misalnya mereka membutuhkan perbaikan jalan setapak yang mulai rusak, saluran air yang sudah tidak memadai lagi, atau membutuhkan perbaikan pasar mingguan, dan lain-lain. Kebutuhan mereka tersebut dapat disampaikan dalam rapat-rapat dusun dan musyawarah dusun, atau bias juga disampaikan kepada tokoh masyarakat setempat untuk disampaikan atau diajukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Tuladenggi.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Tuladenggi tentang partisipasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, mengatakan bahwa:

“Pernah, saya ikut dalam kegiatan pra musrenbang dan musrenbang karena saya salah satu tokoh masyarakat dari dusun II saya merasa terpanggil untuk berpartisipasi dan akan membawa aspirasi masyarakat pada kegiatan musrenbang. Hanya saja, masyarakat yang memberikan memberikan saran, hanya yang itu saya, yang lain masih kurang aktif” (Drs. Mohamad Razak, wawancara tanggal 9 Desember 2021).

Kemudian, peneliti juga memberikan pertanyaan yang sama kepada warga tentang partisipasinya dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, mengatakan bahwa:

“Pernah, yakni kegiatan musdus, karena saya ingin berpartisipasi agar ada kegiatan pembangunan di dusun saya, seperti perbaikan jalan setapak” (Kiko Mohamad (warga dusun 1), wawancara tanggal 10 Desember 2021).

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah terwakilkan dalam kegiatan musyawarah dusun (musdus) yang merupakan kegiatan awal dari perencanaan pembangunan partisipatif untuk menggali kebutuhan apa yang dibutuhkan masyarakat di Desa Tuladenggi.

Disamping partisipasi dalam kegiatan musyawarah dusun dan musyawarah perencanaan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberikan tanggapan, saran dan kritikan dalam kegiatan musyawarah tersebut adalah merupakan yang terpenting.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Tuladenggi tentang pemberian saran dan kritik dalam pertemuan dan rapat dalam pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi, mengatakan bahwa:

“Pernah: saran saya dalam proses pembuatan RPJMDS dilaksanakan sesuai alur yang ditentukan dalam petunjuk Permendagri dengan melihat kebutuhan masyarakat sehingga menjadi skala prioritas program yang disetarakan dengan ketersediaan anggaran. Kritik saya dalam pelaksanaan Pra musrembang saya mengkritik tentang usulan yang didalam Rencana RPJM Des terdapat usulan yang tidak teridentifikasi alokasi anggarannya. Misalnya usulan yang masuk di DAU, APBN, tetap masuk di alokasi APBD demikian juga ada yang masuk ADD (Alokasi Dana Desa)” (Drs. Mohamad Razak, wawancara tanggal 9 Desember 2021).

Kemudian, peneliti juga memberikan pertanyaan yang sama kepada warga, mengatakan bahwa:

“Pernah, saran saya tentang kondisi sarana di dusun saya, yaitu mengenai perbaikan jalan dan salur air agar air tidak mengalir kemana-mana saat hujan” (Kiko Mohamad (warga dusun 1), wawancara tanggal 10 Desember 2021).

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi, terutama proses awal yakni musyawarah dusun (musdus) dalam bentuk pemberian saran berupa kebutuhan pembangunan fisik, seperti perbaikan jalan dan salur air, dan lain-lain.

b) Partisipasi keterampilan

Partisipasi keterampilan masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi dapat dilakukan dengan ikut mengambil bagian dengan memberikan keterampilan yang mereka miliki, seperti keterampilan bidang pertukangan (tukang batu, tukang kayu), dan lain-lain sebagainya.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tentang keterampilan/keahlian dalam pertemuan dan rapat dalam pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi Desa Tuladenggi, mengatakan bahwa:

“Pernah: dari bentuk mengorganisir berupa pembentukan kelompok peserta Musrenbang dan memberikan masukan tentang teknis pelaksanaan supaya tidak terkesan monoton dan membosankan” (Drs. Mohamad Razak, wawancara tanggal 9 Desember 2021).

Kemudian, peneliti juga memberikan pertanyaan yang sama kepada warga, mengatakan bahwa:

“Pernah, berupa penyusunan Rencana anggaran biaya (RAB), dll. RAB merupakan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu terutama dalam proyek pembangunan desa hasil musrenbang” (Teti Usman (warga dusun 2), wawancara tanggal 10 Desember 2021).

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berupa keterampilan atau keahlian dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, lebih banyak pada keterampilan mengorganisir dan membuat dokumen, seperti dokumen RAB, Dokumen ini akan menjadi dasar atau acuan pelaksanaan aktivitas yang dimaksud, mulai dari pemilihan berbagai komponen pendukung (material, pihak penyedia, dan sebagainya) hingga pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

Keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan, tentunya didasari adanya keinginan, sehingga mereka mau ambil bagian dalam kegiatan yang dimaksud dengan memberikan keterampilan yang mereka miliki.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tentang mengapa mereka memberikan keterampilan/keahlian dalam pertemuan dan rapat dalam pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi, mengatakan bahwa:

“Karena dari pengalaman dalam musyawarah dusun, banyak masyarakat yang tidak paham apa yang akan disampaikan, sehingga saya memberikan informasi bahwa dalam musyawarah dusun ini apa yang disampaikan warga akan ditampung dan akan dibawa dalam pelaksanaan musrenbang desa” (Drs. Mohamad Razak, wawancara tanggal 9 Desember 2021).

Alasan yang berbeda disampaikan oleh warga, yang mengatakan bahwa:

“Karena saya ditunjuk sebagai delegasi dalam musrenbang kemarin, dan kebetulan saya punya pengalaman dalam menyusun dokumen menyangkut anggaran, saya ditempatkan pada tim penyusun dokumen pasca musrenbang” (Teti Usman (warga dusun 2), wawancara tanggal 10 Desember 2021).

Jawaban berbeda disampaikan warga masyarakat, yang mengatakan bahwa:

“Tidak pernah, karena saya tidak memiliki keterampilan seperti yang diperlukan pada saat musrenbang dusun maupun musrenbang” (Yurni (warga dusun 3) dan Hasna Tanipu (warga dusun 4), wawancara tanggal 11 Desember 2021).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dasar keinginan warga menyumbangkan keterampilannya dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif ialah karena keinginan agar musrenbang dapat menghasilkan rekomendasi yang berpihak pada pemenuhan kebutuhan warga masyarakat dalam pembangunan di Desa Tuladenggi.

c) **Partisipasi tenaga**

Partisipasi tenaga dalam kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif tentunya harus dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat, seperti kegiatan royong membersihkan tempat musrenbang atau mendekorasi ruangan musrenbang untuk memperlancar kegiatan perencanaan dan pembangunan Desa Tuladenggi. Semua kegiatan tersebut harus dilakukan secara sukarela berdasarkan kesadaran dalam diri sendiri dan tanpa paksaan orang lain.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, dapat dilihat dalam berbagai proses perencanaan pembangunan terutama yang bersifat fisik, di mana pelaksanaannya memerlukan tenaga kerja, seperti pembuatan atau perbaikan kecil tempat penyelenggaraan musrenbang (biasanya di rumah salah satu warga), pembuatan dekorasi ruangan musrenbang, dan lain sebagainya. Pada program-program seperti ini memang diperlukan lebih banyak tenaga (fisik).

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tentang pemberian sumbangan tenaga untuk memperlancar perencanaan pembangunan partisipatif Desa Tuladenggi, mengatakan bahwa:

“Pernah, Sebagai pengarah pra musrenbang dan saya ikut mengatur kursi-kursi peserta dan membantu mendekorasi ruangan yang akan dijadikan tempat musrenbang Desa Tuladenggi” (Drs. Mohamad Razak, wawancara tanggal 9 Desember 2021).

Jawaban yang sama disampaikan oleh warga, yang mengatakan bahwa:

“Pernah, yakni bersama ibu-ibu yang mempersiapkan makanan dan minuman ringan, baik pada saat pra musrenbang atau musyawarah dusun dan pada saat

pelaksanaan musrenbang desa” (Yurni (warga dusun 3), wawancara tanggal 11 Desember 2021).

Pertanyaan berikutnya yang peneliti berikan yakni mengapa memberikan sumbangan tenaga dalam kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif Desa Tulaenggi. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Karena musrembang itu merupakan pedoman pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan dan membentuk arah kebijakan, sehingga sebagai masyarakat harus melibatkan diri dalam memberikan sumbangsi dalam musyawarah usulan yang menjadi usulan prioritas untuk tahun anggaran yang direncanakan” (Drs. Mohamad Razak, wawancara tanggal 9 Desember 2021).

Dapat disimpulkan bahwa warga masyarakat sebagian sudah berpartisipasi dalam proses kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif Desa Tuladenggi, baik pada saat musyawarah dusun maupun musrenbang dalam bentuk gotong royong menyiapkan tempat, membersihkan kotoran, dan mendekorasi ruangan untuk pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa.

d) Partisipasi harta benda/uang/modal

Bentuk partisipasi dalam proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Tuladenggi yang terakhir ialah partisipasi dalam bentuk harta benda/uang/modal. Partisipasi ini tidak banyak warga masyarakat yang dapat melakukannya karena keterbatasan ekonomi, sehingga partisipasi ini hanya diperuntukkan untuk warga masyarakat tertentu saja.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk harta benda/uang/modal, mengatakan bahwa:

“Saya pernah memberi dalam bentuk uang, tapi tidak seberapa untuk keperluan membeli makanan atau minuman ringan, seperti kukis, the atau kopi” (Drs. Mohamad Razak, wawancara tanggal 9 Desember 2021).

Dapat dikatakan bahwa untuk partisipasi masyarakat dalam bentuk harta benda/uang/modal, sebagian besar tidak dilakukan, walaupun ada, hanya untuk keperluan membeli makanan atau minuman ringan saja.

Adapun biaya yang dibutuhkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif (musrenbang) Desa Tuladenggi, semuanya bersumber dari dana desa. Hasil wawancara dengan kepala Desa Tuladenggi menyangkut sumber dana musrenbang, mengatakan bahwa:

“Dari dana desa, jadi semua biaya yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya proses perencanaan pembangunan partisipatif di desa ini, semuanya diambil dari dana desa, walaupun ada warga masyarakat yang mau berpartisipasi untuk menyumbangkan sebagian rezeki, bisa digunakan untuk keperluan lain, seperti membeli makanan dan minuman ringan” (Johan Panigoro, wawancara tanggal 7 Desember 2021).

4.3 Pembahasan

Dalam proses pembangunan partisipatif, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat

berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan, dan sebagai keluaran partisipasi dapat digerakkan atau dibangun dengan memberikan motivasi melalui berbagai upaya.

Selama ini, pelaksanaan pembangunan hanya menempatkan masyarakat sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan. Idealnya pemerintah bersikap responsif terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan mau mendengarkan kemauan mereka. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sangat tergantung pada peran pemerintah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa, dan masyarakat. Kerjasama antara ketiganya harus tercipta, sebab tanpa masyarakat pemerintah tidak dapat mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Perencanaan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat, hanya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Strategi pembangunan juga harus tepat, agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi telah disusun oleh pemerintah Desa Tuladenggi dan dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) desa, yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Menurut Kessa (2015:11), sangat perlu menyusun perencanaan pembangunan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik, akan melahirkan pelaksanaan

program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tuladenggi mempunyai fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat telah melakukan fungsinya dengan menampung aspirasi warga masyarakat melalui musyawarah dusun (musdus) dan aspirasi masyarakat tersebut akan dibawa ke musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Tuladenggi. Hal ini telah sesuai dengan salah fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yaitu merencanakan pembangunan yang partisipatif, yaitu melibatkan komponen masyarakat yang ada di dalam kesatuan wilayah kelurahan/desa dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui perencanaan dan pelaksanaan.

Selain itu, salah satu fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam perencanaan pembangunan partisipatif ialah menggerakkan partisipasi masyarakat, baik dalam kegiatan perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Tuladenggi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk menggerakkan secara maksimal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, terutama mengumpulkan informasi terkait apa yang paling mendasar dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Tuladenggi, LPM telah mengadakan musyawarah dusun (musdus) yang dihadiri perwakilan warga masyarakat dari rukun tetangga dan rukun warga, dimana sebelum pelaksanaan musyawarah dusun (musdus) tersebut, para ketua RT dan RW harus

berembuk atau bermusyawarah terlebih dahulu dengan warga masyarakat, terutama kegiatan pembangunan fisik dan non fisik apa yang paling prioritas mereka butuhkan di dusun masing-masing. Hasil rembuk disetiap RT dan RW tersebut itulah, yang dibawa para ketua RT dan RW dalam musyawarah dusun. Hasil dari musyawarah dusun tersebut, dibuatkan laporan hasil musdus dalam bentuk draf awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Tuladenggi, yang selanjutnya akan dibawa sebagai bahan ke musyawarah desa yang akan dilaksanakan setiap bulan januari yang menghasilkan Rencana Kegiatan Desa (RPJMD). Musyawarah dusun yang dilaksanakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tuladenggi, sesuai dengan fungsi LPM yang kedua, yakni menggerakkan partisipasi berupa swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan, yaitu menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan secara terpadu, baik berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat.

Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Tuladenggi yang merupakan wujud perencanaan pembangunan partisipatif, diselenggarakan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang berasal dari kebutuhan pembangunan masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan kegiatan musyawarah yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Tuladenggi, berasal dari dana desa, dan khusus untuk warga

masyarakat, biasanya mereka membantu menyediakan makanan dan minuman ringan pada saat pelaksanaan musyawarah dusun dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif, dapat diketahui bahwa warga masyarakat sudah mulai berpartisipasi pada saat musyawarah di RT dan RW dan musyawarah dusun (musdus), ada yang menyampaikan secara langsung, dan ada juga melalui perwakilan tokoh masyarakat dusun setempat, namun jumlah warga yang menyampaikan masukan, masih kurang maksimal. Bentuk partisipasi tersebut berupa penyampaian masukan tentang prioritas pembangunan yang mereka butuhkan, terutama pembangunan fisik. Adapun partisipasi dalam bentuk tenaga, masyarakat juga sudah cukup berpartisipasi dalam menyiapkan tempat penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tuladenggi dan menyiapkan makanan dan minuman ringan untuk warga dan juga pada saat pelaksanaan musrenbang. Partisipasi yang masih kurang maksimal adalah partisipasi dalam bentuk keterampilan. Padahal bentuk partisipasi ini bisa dimanfaatkan dengan membuat disain penyelenggaraan musrenbang. Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat dalam bentuk harta benda/uang/modal dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif juga masih kurang dalam bentuk swadaya gotong royong (pengumpulan dana), karena terkait juga dengan kondisi perekonomian warga masyarakat Desa Tuladenggi.

Untuk ke depan, lembaga pemberdayaan masyarakat Desa Tuladenggi harus lebih memaksimalkan lagi fungsinya sebagai wadah partisipasi warga masyarakat.

Hal ini karena partisipasi masyarakat menjadi salah satu jargon yang telah mengemuka saat ini dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, proses pemerintahan yang dijalankan atas dasar partisipasi masyarakat telah memiliki salah satu karakteristik sebagai pemerintahan yang baik (Hosnan, 2007:36).

Musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan, baik untuk program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka menengah maupun rencana jangka pendek, seharusnya dilakukan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat sebagai wujud perencanaan dari bawah. Hal ini dilakukan dengan melibatkan semua unsur, termasuk berbagai pihak terkait dengan mekanisme perencanaan pembangunan desa. Perencanaan yang dibuat oleh masyarakat diawali dengan membuat daftar kebutuhan masyarakat dan merupakan masukan dalam proses perencanaan untuk menjadi sebuah dokumen perencanaan yang mencerminkan keterlibatan masyarakat secara luas. Masukan yang dibuat oleh masyarakat didasarkan pada berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat, untuk kemudian dijadikan sebagai program maupun kegiatan yang butuh penanganan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi sudah melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kegiatan pembangunan desa. Pelibatan masyarakat tersebut dimulai pada saat pelaksanaan musyawarah dusun (musdus) yang dihadiri perwakilan warga masyarakat dari rukun tetangga dan rukun warga. Hasil dari musyawarah di setiap dusun tersebut, dibuatkan laporan hasil musdus dalam bentuk draf awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Tuladenggi, yang selanjutnya akan dibawa sebagai bahan ke musyawarah desa yang akan dilaksanakan setiap bulan januari yang menghasilkan Rencana Kegiatan Desa (RPJMD).
2. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi, dari aspek partisipasi buah pikiran, sudah dilakukan oleh masyarakat, dimana ada yang menyampaikan secara langsung, dan ada juga melalui perwakilan tokoh masyarakat dusun setempat, namun jumlah warga yang menyampaikan masukan, masih kurang maksimal. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterampilan, masih kurang maksimal. Adapun partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, juga telah dilakukan masyarakat, yakni dalam menyiapkan

tempat penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tuladenggi dan menyiapkan makanan dan minuman ringan untuk warga dan juga pada saat pelaksanaan musrenbang. Sedangkan, partisipasi masyarakat dalam bentuk harta benda/uang/modal, juga masih kurang dalam bentuk swadaya gotong royong (pengumpulan dana), karena terkait juga dengan kondisi perekonomian warga masyarakat Desa Tuladenggi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa, lebih aktif melakukan pendekatan dan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang Rencana Pembangunan Desa. Di samping itu, juga melibatkan tokoh masyarakat di setiap dusun untuk aktif menanyakan kepada masyarakat disekitarnya mengenai apa yang mereka butuhkan untuk dibangun di dusunnya.
2. Memperkuat kelembagaan yang ada di Desa Tuladenggi, sebagai wadah partisipasi masyarakat, seperti LPM, ataupun ruang kelembagaan lain yang sudah ada di desa, yakni mulai dari tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Di samping itu, perlu dibangun satu mekanisme partisipasi masyarakat yang memungkinkan warga untuk dapat terlibat secara aktif dan bebas dalam setiap program dan rencana pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- PP 40 2006 tentang *Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional*. Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Alfitri. 2018. *Community development, teori dan aplikasi*. Pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Andi Prastowo. (2016). *Metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Aryati Puspasari Abady (2013). *Perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah*. Jurnal Otoritas, Vol. III No.1 April 2013.
- Edi Suharto. 2016. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Fathurrahman Fadil. 2013. *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kotabaru tengah*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013.
- Herman (2019). *Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene*. Growth jurnal ilmiah ekonomi pembangunan, volume 1, No. 1, 75-98, 2019
- Hosnan. 2007. *Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Membangun Indonesia dari Daerah: Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah. Jakarta: JICA.

- Josef Kaho. 2018. *Prospek Otomoni Daerah di Daerah Republik Indonesia*. RajaGarfindo, Jakarta.
- Jusman Iskandar. 2016. *Strategi Dasar Membangun Kekuatan Masyarakat*. Rajawali. Jakarta.
- Kasim Usman. 2019. *Migrasi di Kota-Kota Besar*. PLPIIS. Jakarta.
- Khairuddin. 2017. *Pembangunan Masyarakat*. Liberty, Yogyakarta.
- Lexy J Moleong.. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Minarni (2014). *Evaluasi kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan potensi desa (studi pada desa blankahan kecamatan kuala kabupaten langkat tahun 2013)*. PERSPEKTIF/ VOLUME 7/ NOMOR 2/ OKTOBER 2014.
- Mubyarto. 2018. *Pembangunan Partisipatif*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nawawi, H. 2013. *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang *Kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)*
- Saeful Muluk. 2019. *Panduan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan*. FPPM, Bandung.
- Sugiyono. 2017. *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

- Tesyalom Sembel, dkk (2019). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Fisip. Unsrat.
- Taliziduhu Ndraha. 2017. *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Tjokrowinoto. 2017. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Wahyudin Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.

PEDOMAN WAWANCARA

KEPALA DESA:

Nama :

Hari/tgl.bltn :

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DESA TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU

1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan partisipatif (musrenbang) di Desa Tuladenggi?
2. Permasalahan utama apa yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif (musrenbang) di Desa Tuladenggi?
3. Dari mana sumber pendanaan perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Tuladenggi.

PEDOMAN WAWANCARA

KETUA LPM

Nama :

Hari/tgl.blm :

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DESA TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU

1. Bagaimana proses perencanaan pembangunan partisipatif (musrenbang) di Desa Tuladenggi?
2. Dari mana sumber pendanaan perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Tuladenggi. Apa ada bantuan dana dari masyarakat.
3. Permasalahan utama apa yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif (musrenbang) di Desa Tuladenggi?
4. Bagaimana cara LPM menggerakkan partisipasi masyarakat untuk aktif dalam perencanaan pembangunan desa? Dan apa permasalahannya.

PEDOMAN WAWANCARA

TOKOH MASYARAKAT

Nama :

Hari/tgl.blm :

1. Pernahkan saudara ikut dalam pertemuan dan rapat dalam pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi? Dan mengapa saudara ikut/tidak ikut!
2. Pernahkan saudara memberikan saran dan kritik dalam pertemuan dan rapat dalam pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi? Dan menyangkut apa saran dan kritik tersebut!
3. Pernahkan saudara memberikan keterampilan/keahlian dalam pertemuan dan rapat dalam pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi? Berupa apa?
4. Mengapa saudara turut memberikan keterampilan/keahlian dalam pertemuan dan rapat dalam pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi?
5. Pernahkan saudara memberikan sumbangan tenaga untuk memperlancar pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi? Berupa apa?
6. Mengapa saudara memberikan sumbangan tenaga untuk memperlancar pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi?
7. Pernahkan saudara memberikan sumbangan harta benda dan uang untuk memperlancar pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi?
8. Mengapa saudara memberikan sumbangan harta benda dan uang untuk memperlancar pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi?

PEDOMAN WAWANCARA

MASYARAKAT

Nama :

Hari/tgl.bltn :

1. Pernahkan saudara ikut dalam pertemuan dan rapat dalam pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi? Dan mengapa saudara ikut/tidak ikut!
2. Pernahkan saudara memberikan saran dan kritik dalam pertemuan dan rapat dalam pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi? Dan menyangkut apa saran dan kritik tersebut!
3. Pernahkan saudara memberikan keterampilan/keahlian dalam pertemuan dan rapat dalam pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi? Berupa apa?
4. Mengapa saudara turut memberikan keterampilan/keahlian dalam pertemuan dan rapat dalam pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi?
5. Pernahkan saudara memberikan sumbangan tenaga untuk memperlancar pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi? Berupa apa?
6. Mengapa saudara memberikan sumbangan tenaga untuk memperlancar pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi?
7. Pernahkan saudara memberikan sumbangan harta benda dan uang untuk memperlancar pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi?
8. Mengapa saudara memberikan sumbangan harta benda dan uang untuk memperlancar pra musrenbang dan musrenbang Desa Tuladenggi?

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

1. FOTO/DOKUMEN KEGIATAN MUSRENBANG DESA TULADENGGI
2. DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG
3. STRUKTUR ORGANISASI DESA TULADENGGI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
4. STRUKTUR ORGANISASI LPM DESA TULADENGGI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
5. DOKUMEN HASIL MUSRENBANG DESA TULADENGGI
6. FOTO KANTOR DESA TULADENGGI
7. FOTO KANTOR LPM DESA TULADENGGI
8. FOTO WAWANCARA DENGAN INFORMAN

WAWANCARA KEPALA DESA

NAMA : JOHAN PANIGORO

Hari/tgl.blm : 7 Desember 2021

JAWABAN :

1. Proses Musrembang adalah agenda Desa yang mengumpulkn unsur BPD, unsur masyarakat untuk membahas Rencana program Pembangunan untuk 1 tahun ke depan. Mengenai pelaksanaannya semuanya diserahkan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat desa tuladenggi, termasuk menampung aspirasi masyarakat tentang apa saja yang mereka butuhkan untuk segera dibangun di desa ini.
2. Kendala yang dihadapi pada saat mengundang masyarakat, kebiasaan masyarakat cenderung pasif terhadap pertemuan-pertemuan atau agenda yang diselenggarakan desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat untuk meminta masukan tentang apa yang harus dibangun di desa ini dan akan direncanakan dalam kegiatan perencanaan di Desa Tuladenggi.
3. Dari dana desa, jadi semua biaya yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya proses perencanaan pembangunan partisipatif di desa ini, semuanya diambil dari dana desa, walaupun ada warga masyarakat yang mau berpartisipasi untuk menyumbangkan sebagian rezeki, bisa digunakan untuk keperluan lain, seperti membeli makanan dan minuman ringan.

WAWANCARA KETUA LPM

NAMA : RAMOND KARIM, S.IP

Hari/tgl.blm : 8 Desember 2021

JAWABAN :

1. Musrenbang dilaksanakan setiap bulan Januari. Sebelum pelaksanaan, kami mengadakan sosialisasi di masyarakat di tiap-tiap dusun bahwa akan diadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang). Untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pembangunan di desa ini, kami mengadakan musyawarah dusun (musdus). Musyawarah yang dilaksanakan di tiap dusun keterwakilan dari beberapa RW untuk menentukan permasalahan prioritas di dusun tersebut berupa draft Rancangan Awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa yang akan di bawa sebagai bahan ke musyawarah desa. Musyawarah desa adalah musyawarah yang bertujuan memilih mana permasalahan yang paling prioritas sesuai hasil ketika musdus dilaksanakan dan dilanjutkan penetapan Rencana Kegiatan Desa (RPJMD).
2. Sumber pendanaan perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Tuladenggi berasal dari dana desa, dan bukan berasal dari warga masyarakat. Bantuan masyarakat biasanya berupa penyediaan makanan dan minuman ringan (teh, kopi, dan lain-lain), serta rumah warga yang akan dijadikan tempat pelaksanaan perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa.
3. Pada saat Musdus (musyawarah Dusun) semua aspirasi ditampung, ketika pada saat pelaksanaan musrenbang ada sebagian masyarakat yang ngotot ingin aspirasinya dimasukkan ke dalam rencana pembangunan, tapi tidak disampaikan pada saat musyawarah dusun.
4. Melakukan pendekatan dan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang Rencana Pembangunan Desa. Kami juga melibatkan tokoh masyarakat di setiap

dusun untuk aktif menanyakan kepada masyarakat disekitarnya mengenai apa yang mereka butuhkan untuk dibangun di dusunnya.

WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

NAMA : Drs. MOHAMAD RAZAK

Hari/tgl.blm : 9 Desember 2021

JAWABAN :

1. Pernah, saya ikut dalam kegiatan pra musrenbang dan musrenbang karena saya salah satu tokoh masyarakat dari dusun II saya merasa terpanggil untuk berpartisipasi dan akan membawa aspirasi masyarakat pada kegiatan musrenbang. Hanya saja, masyarakat yang memberikan memberikan saran, hanya yang itu saya, yang lain masih kurang aktif.
2. Pernah : saran saya dalam proses pembuatan RPJMDS dilaksanakan sesuai alur yang ditentukan dalam petunjuk Permendagri dengan melihat kebutuhan masyarakat sehingga menjadi skala prioritas program yang disetarakan dengan ketersediaan anggaran. Kritik saya dalam pelaksanaan Pra musrenbang saya mengkritik tentang usulan yang didalam Rencana RPJM Des terdapat usulan yang tidak teridentifikasi alokasi anggarannya. Misalnya usulan yang masuk di DAU, APBN, tetap masuk di alokasi APBD demikian juga ada yang masuk ADD (Alokasi Dana Desa)
3. Pernah: dari bentuk mengorganisir berupa pembentukan kelompok peserta Musrenbang dan memberikan masukan tentang teknis pelaksanaan supaya tidak terkesan monoton dan membosankan.
4. Karena dari pengalaman dalam musyawarah dusun, banyak masyarakat yang tidak paham apa yang akan disampaikan, sehingga saya memberikan informasi bahwa dalam musyawarah dusun ini apa yang disampaikan warga akan ditampung dan akan dibawa dalam pelaksanaan musrenbang desa.
5. Pernah, Sebagai pengarah pra musrenbang dan saya ikut mengatur kursi-kursi peserta dan membantu mendekorasi ruangan yang akan dijadikan tempat musrenbang Desa Tuladenggi.
6. Karena musrenbang itu merupakan pedoman pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan dan membentuk arah kebijakan, sehingganya sebagai masyarakat harus melibatkan diri dalam memberikan sumbangsi dalam musyawarah usulan yang menjadi usulan prioritas untuk tahun anggaran yang direncanakan.
7. Saya pernah memberi dalam bentuk uang, tapi tidak seberapa untuk keperluan membeli makanan dan minuman ringan, seperti kukis, the atau kopi
8. Pelaksanaan Musrenbang itu adalah bagian bentuk dari tanggung jawab masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat.

Masyarakat I

Nama : Kiko Mohamad (warga dusun 1)

Hari/tgl.blm : 10 Desember 2021

Jawaban :

1. Pernah, yakni kegiatan musdus, karena saya ingin berpartisipasi agar ada kegiatan pembangunan di dusun saya, seperti perbaikan jalan setapak.
2. Pernah, saran saya tentang kondisi sarana di dusun saya, yaitu mengenai perbaikan jalan dan salur air agar air tidak mengalir kemana-mana saat hujan.
3. Pernah, saya berpartisipasi dalam mendirikan tenda ditempat yang akan dijadikan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa tuladenggi
4. Karena saya ingin menyampaikan aspirasi saya dan mendirikan tenda itu tidak terlalu sulit, jadi saya bantu demi kelancaran musrenbang
5. Pernah, berupa mengawasi jalannya pembangunan dari hasil musrenbang
6. Karena hanya itu yang dapat saya sumbangkan untuk pembangunan Desa
7. Pernah, tapi jarang, yang paling sering yakni sumbangan berupa tenaga
8. Karena merasa terpanggil untuk ikut menyumbangkan sedikit dari apa yang saya miliki.

Masyarakat II

Nama : Teti Usman (warga dusun 2)

Hari/tgl.blh : 10 Desember 2021

Jawaban :

1. Pernah, karena saya merupakan salah satu dari team delegasi di musrenbang
2. Pernah, saya mengusulkan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang tidak sempat hadir
3. Pernah, berupa penyusunan Rencana anggaran biaya (RAB), dll. RAB merupakan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu terutama dalam proyek pembangunan desa hasil musrenbang.
4. Karena saya ditunjuk sebagai delegasi dalam musrenbang kemarin, dan kebetulan saya punya pengalaman dalam menyusun dokumen menyangkut anggaran, saya ditempatkan pada tim penyusun dokumen pasca musrenbang.
5. Pernah
6. Karena saya merasa sebagai warga harus mendukung setiap program di desa ini
7. Tidak pernah, biasanya sumbang kukis saja atau biasa juga teh atau kopi
8. Tidak pernah

Masyarakat III

Nama : Yurni (warga dusun 3)

Hari/tgl.blm : 11 Desember 2021

Jawaban :

1. Pernah, karena sebagai warga masyarakat saya merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi
2. Pernah, waktu itu saya mengusulkan perbaikan fasilitas-fasilitas umum di dusun 3 pada saat musyawarah dusun
3. Tidak pernah, karena saya tidak memiliki keterampilan seperti yang diperlukan pada saat musrenbang dusun maupun musrenbang.
4. Tidak Ada
5. Pernah, yakni bersama ibu-ibu yang mempersiapkan makanan dan minuman ringan, baik pada saat pra musrenbang atau musyawarah dusun dan pada saat pelaksanaan musrenbang desa
6. Tidak Ada
7. Pernah, berupa swadaya masyarakat
8. Tidak ada

Masyarakat IV

Nama : Hasna Tanipu (warga dusun 4)

Hari/tgl.blm : 11 Desember 2021

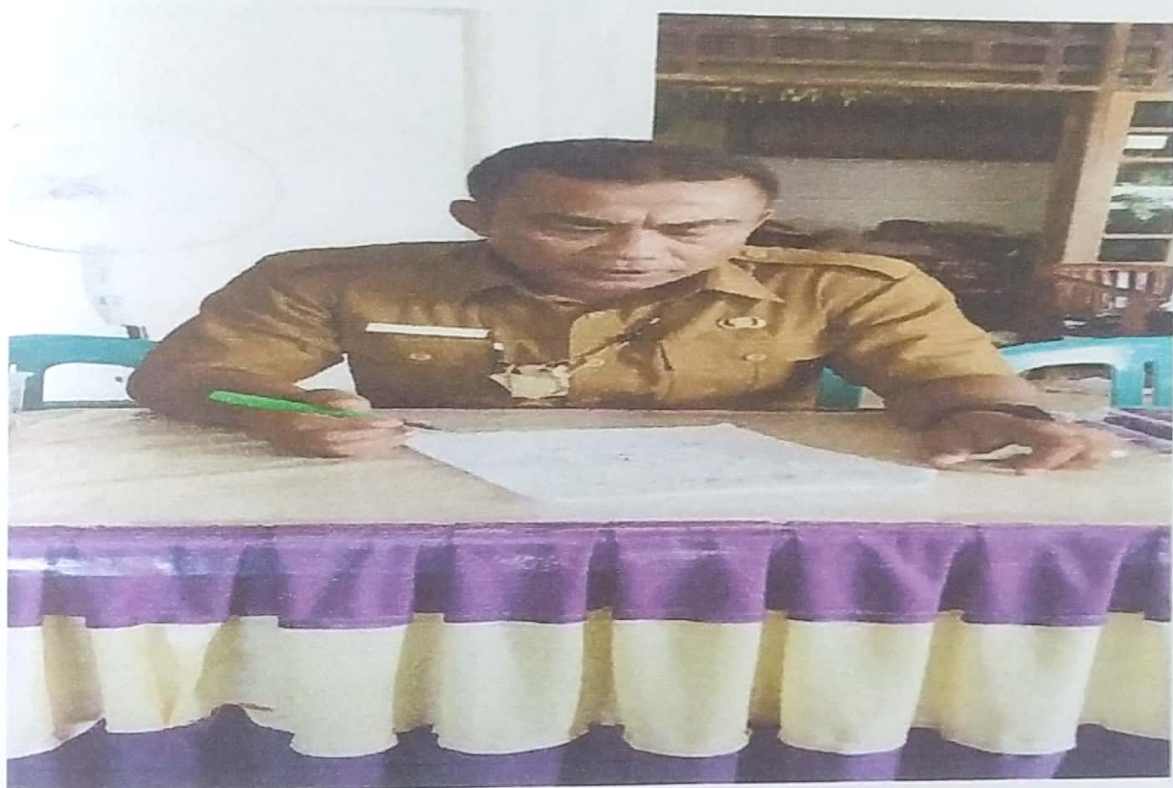
Jawaban :

1. Pernah karena saya ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, yakni musyawarah di dusun 4
2. Pernah, yakni berupa perbaikan jalan setapak, dan MCK
3. Tidak ada, saya tidak memiliki keterampilan
4. Tidak ada
5. Tidak ada
6. Tidak
7. Tidak ada
8. Tidak ada



Kantor Desa Tuladenggi





**FOTO MUSYAWARAH DESA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDes)
TAHUN ANGGARAN 2022**

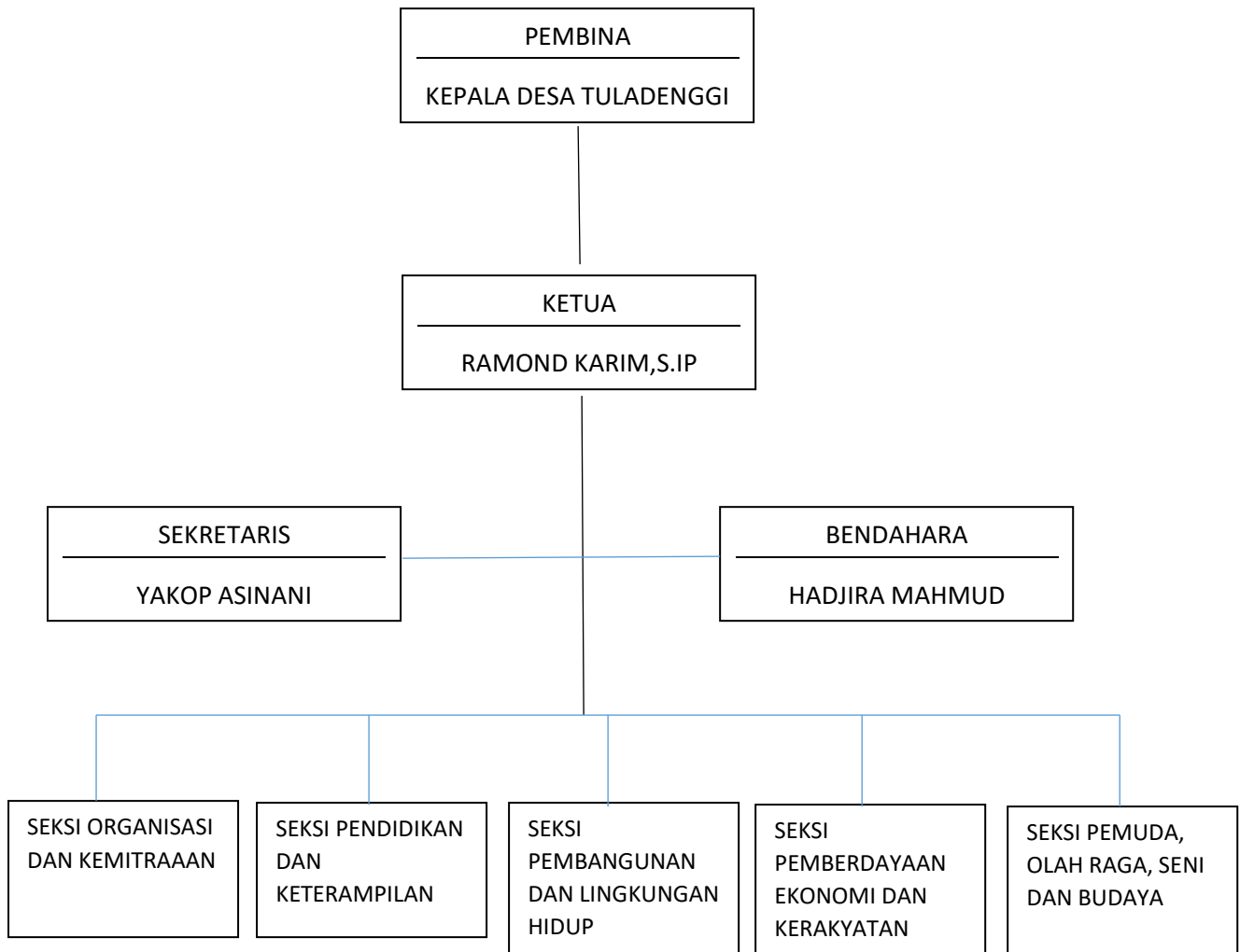


DOKUMENTASI **PEKERJAAN SPAL DUSUN III**

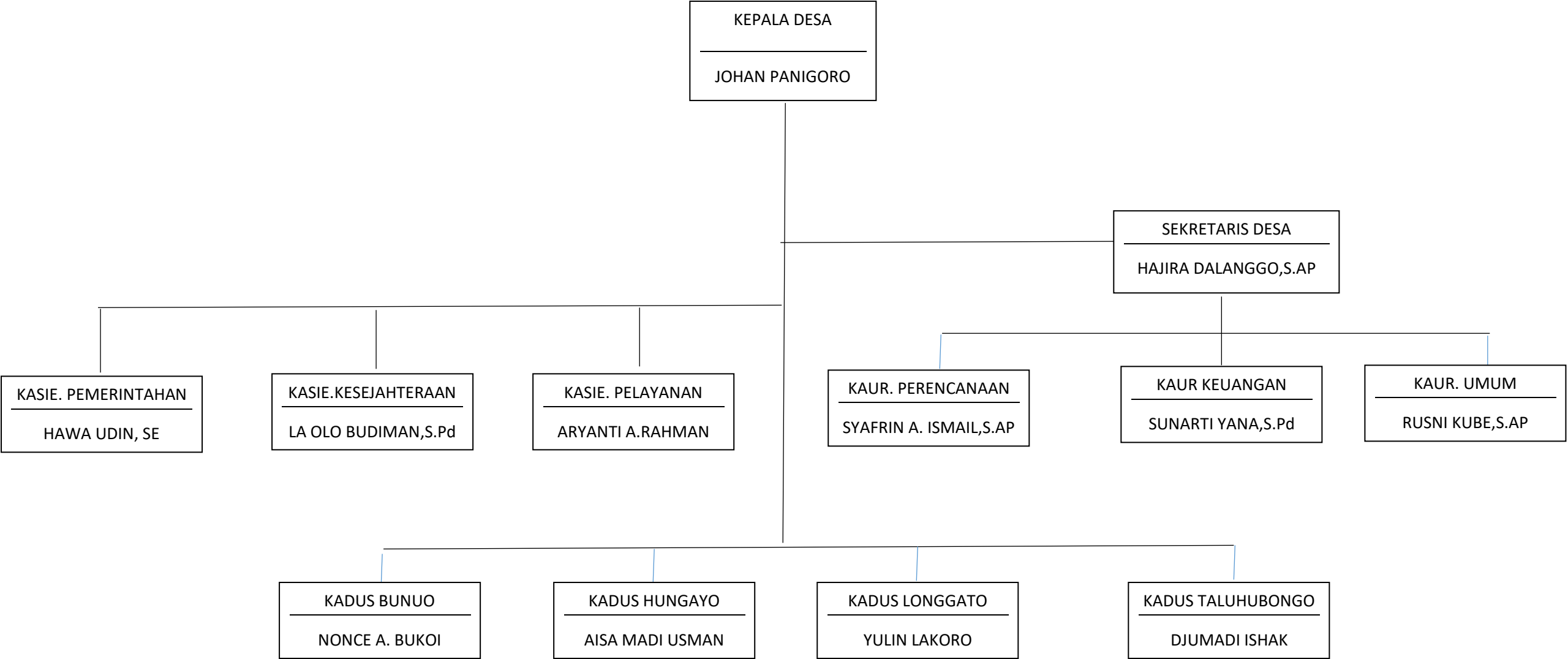


**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(LPM)**

DESA TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA TULADENGGI KEC. TELAGA BIRU



ABSTRAK

ISKANDAR BILONDATU. S2117006. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pembangunan partisipatif dan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Adapun penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive, dan dipilih sebagai informan adalah Kepala Desa Tuladenggi, Ketua LPMD Desa Tuladenggi, Tokoh masyarakat Desa Tuladenggi, dan masyarakat Desa Tuladenggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi sudah melibatkan masyarakat sebagai kelompok sasaran dari kegiatan pembangunan desa. Pelibatan masyarakat tersebut dimulai pada saat pelaksanaan musyawarah dusun (musdus) yang dihadiri perwakilan warga masyarakat dari rukun tetangga dan rukun warga. Hasil dari musyawarah di setiap dusun tersebut, dibuatkan laporan hasil musdus dalam bentuk draf awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Tuladenggi, yang selanjutnya akan dibawa sebagai bahan ke musyawarah desa. Adapun, bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Desa Tuladenggi, dari aspek partisipasi buah pikiran, sudah dilakukan oleh masyarakat, dimana ada yang menyampaikan secara langsung, dan ada juga melalui perwakilan tokoh masyarakat dusun setempat, namun jumlah warga yang menyampaikan masukan, masih kurang maksimal. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterampilan, masih kurang maksimal. Adapun partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga, juga telah dilakukan masyarakat, yakni dalam menyiapkan tempat penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tuladenggi dan menyiapkan makanan dan minuman ringan untuk warga dan juga pada saat pelaksanaan musrenbang. Sedangkan, partisipasi masyarakat dalam bentuk harta benda/uang/modal, juga masih kurang dalam bentuk swadaya gotong royong (pengumpulan dana), karena terkait juga dengan kondisi perekonomian warga masyarakat Desa Tuladenggi.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan partisipatif, lembaga pemberdayaan masyarakat desa



ABSTRACT

ISKANDAR BILONDATU. S2117006. THE COMMUNITY PARTICIPATION IN PARTICIPATORY DEVELOPMENT PLANNING AT TULADENGGI VILLAGE, TELAGA BIRU SUBDISTRICT, GORONTALO DISTRICT

This study aims to find participatory development planning and forms of community participation in participatory development planning at Tuladenggi Village, Telaga Biru Subdistrict. This research uses a qualitative approach with a case study method. The determination of informants is carried out using a purposive technique covering the Tuladenggi Village Head, Chief of Tuladenggi Village Community Empowerment Board, Tuladenggi Village Community Leaders, and Tuladenggi Village Community. The results of the study indicate that participatory development planning at Tuladenggi Village has involved the community as the target group of village development activities. Community involvement begins with the hamlet meeting attended by representatives of community members from the neighborhood and community units. The deliberation in each hamlet covers the hamlet meeting report made as an initial draft of the Tuladenggi Village Government Work Plan to function as material to the village meeting. Meanwhile, the form of community participation in participatory development planning in Tuladenggi Village, from the aspect of participation ideas, has been carried out by the community where some convey directly, and some are also through representatives of local hamlet community leaders. However, the number of residents who submit inputs is still lacking. Community participation in the form of skills is still not optimal. Community participation in the form of energy has also been carried out by the community, namely in preparing the venue for the Tuladenggi Village development planning deliberation and preparing food and soft drinks for residents as well as during the implementation of the Development Planning Conference. Meanwhile, community participation in the form of property/money/capital is still lacking in the case of self-help mutual assistance (fundraising) because it is also related to the economic condition of the people of Tuladenggi Village.

Keywords: *community participation, participatory development planning, village community empowerment institutions*





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3728/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/VIII/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Tuladenggi

di,-

Tempat


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Iskandar Bilondatu
NIM : S2117006
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : DESA TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU
Judul Penelitian : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA TULADENGGI
KECAMATAN TELAGA BIRU

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 Agustus 2021
Ketua

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

KECAMATAN TELAGA BIRU

DESA TULADENGGI

Jln A.A Wahab Depan Koramil 1304-05 Telaga Desa Tuladenggi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1421/ Tul /Tlg.B/XII/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JOHAN PANIGORO**
Jabatan : Kepala Desa Tuladenggi
Alamat : Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru

Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo terkait izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal /Skripsi dari salah satu Mahasiswa :

N a m a : **ISKANDAR BILONDATU**
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIM : S2117006
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas benar – benar telah melakukan kegiatan Penelitian di lingkungan Pemerintah Desa Tuladenggi

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk digunakan seperlunya.

Tuladenggi, 03 Desember 2021
KEPALA DESA TULADENGGI

JOHAN PANIGORO



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 1103/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ISKANDAR BILONDATU
NIM : S2117006
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Partisipas Masyarakat Dalam Perencanaan
Pembangunan Partisipatif Di Desa Tuladenggi Kec.
Tela Biru

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 13 Desember 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

S2117006

SKRIPSI_ISKANDAR BILONDATU. NIM. S2117006. PARTISIPASI ...

Sources Overview

32%

OVERALL SIMILARITY

1	repo.apmd.ac.id	5%
	INTERNET	
2	lpmcibadak.blogspot.com	4%
	INTERNET	
3	repository.radenintan.ac.id	2%
	INTERNET	
4	issuu.com	2%
	INTERNET	
5	bappeda.pontianakkota.go.id	1%
	INTERNET	
6	id.123dok.com	1%
	INTERNET	
7	analisnews.co.id	1%
	INTERNET	
8	www.scribd.com	<1%
	INTERNET	
9	ejournal.an.fisip-unmul.ac.id	<1%
	INTERNET	
10	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
	INTERNET	
11	repository.unhas.ac.id	<1%
	INTERNET	
12	text-id.123dok.com	<1%
	INTERNET	
13	eprints.walisongo.ac.id	<1%
	INTERNET	
14	dspace.uui.ac.id	<1%
	INTERNET	
15	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id	<1%
	INTERNET	
16	repository.usu.ac.id	<1%
	INTERNET	

17	www.cryptonias.my.id	INTERNET	<1%
18	bloggoroh.blogspot.com	INTERNET	<1%
19	es.scribd.com	INTERNET	<1%
20	media.neliti.com	INTERNET	<1%
21	www.ojs.uma.ac.id	INTERNET	<1%
22	desapadajaya.wordpress.com	INTERNET	<1%
23	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
24	123dok.com	INTERNET	<1%
25	kkg-gugus5cililin.blogspot.com	INTERNET	<1%
26	moam.info	INTERNET	<1%
27	cikitu.desa.id	INTERNET	<1%
28	contohmakalah-doc.blogspot.com	INTERNET	<1%
29	www.jojonomic.com	INTERNET	<1%
30	sakip.pertanian.go.id	INTERNET	<1%
31	repository.fisip-untirta.ac.id	INTERNET	<1%
32	eprints.iain-surakarta.ac.id	INTERNET	<1%
33	www.civilstudio.site	INTERNET	<1%
34	repository.uinjambi.ac.id	INTERNET	<1%
35	stiemmamuju.e-journal.id	INTERNET	<1%
36	core.ac.uk	INTERNET	<1%
37	desa1wanamekar.wordpress.com	INTERNET	<1%
38	eprints.umm.ac.id	INTERNET	<1%
39	pt.scribd.com	INTERNET	<1%

40

repository.unbari.ac.id
INTERNET

<1%

41

eloksksmblog.wordpress.com
INTERNET

<1%

42

icerd2018.conference.upi.edu
INTERNET

<1%

43

docplayer.info
INTERNET

<1%

44

www.pps.unud.ac.id
INTERNET

<1%

Excluded search repositories:

Submitted Works

Excluded from document:

Bibliography

Quotes

Small Matches (less than 20 words)

Excluded sources:

None

Biodata Pribadi



Nama : Iskandar Biondatu
Nim : S2117006
Tempat/tgl lahir : Gorontalo, 23 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Angkatan : 2017
Fakultas : Ilmu Pemerintahan
Agama : Islam
Alamat : Desa Tuladenggi , Kec Telaga Biru , Kab.Gorontalo

Pendidikan Formal

Tahun 2009 menyelesaikan studi SD (SDN 2 TULADENGGI)
Tahun 2010 melanjutkan studi di SMP (SMP 2 TELAGA BIRU)
Tahun 2016 menyelesaikan studi di SMA (SMA 1 ELAGA)
Tahun 2017 melanjutkan studi di UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
Tahun 2019 mengikuti pendidikan TENTARA dan selesai pada tahun 2020